JSMP
Timor-Leste

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁL

2012 Proyek Pemantauan Parlemen

JSMP Laporan Tahunan

UN Photo/Martine Perret

The Asia Foundation

Justice Facility
A Bilateral Co-operation between the Governments
of Timor-Leste and Australia
2008-2013

Australian AID

Embassy of Finland

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

UNDEF The United Nations Democracy Fund

TABEL ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF **1**

PENGANTAR **3**

1. PEMILIHAN UMUM 2012 **4**

2. KEGIATAN PARLEMEN NASIONAL **5**

A. Kemajuan Legislatif 5

B. Resolusi Parlemen 7

C. Pengawasan 9

D. Kegiatan lainnya 12

E. Komisi A 13

3. HAMBATAN-HAMBATAN **15**

A. Kehadiran yang tidak teratur dari anggota parlemen 15

B. Proses legislatif tidak efektif 17

C. Sumber daya parlemen tidak dikelola dengan efisien 18

4. KEGIATAN JSMP **21**

A. Pelatihan kepada masyarakat 21

B. Seminar Nasional 21

C. Evaluasi 22

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI **23**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan pokok dari Program Pemantaun Parlamen (*Parliament Wacth Project* – PWP) adalah untuk melakukan pemantauan terhadap kompetensi dan peranan Parlemen Nasional dalam proses pembuatan undang-undang, pengawasan dan mengambil keputusan politik. Tujuan program PWP adalah untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses demokrasi.

Laporan ini memberikan rekomendasi praktis mengenai bagaimana dapat memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang baik di Timor-Leste. JSMP mengembangkan rekomendasi-rekomendasi ini berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukannya atas kegiatan parlemen selama tahun 2012.

Pada tahun 2012, Timor-Leste menyelenggarakan dua kali pemilihan umum dengan sukses – pemilihan Parlemen diselenggarakan pada 7 Juli 2012 dan pemilihan Presiden pada tanggal 17 Maret 2012. Pemilihan umum ini dilaksanakan tanpa adanya konflik dan semua orang dengan bebas memilih perwakilannya yang berjumlah 65 orang. Komisi Nasional Pemilihan Umum (CNE) dan Sekretariat Teknis Administrasi Pemilihan (STAE) mengemban tanggungjawab dari UNMIT untuk menjalankan sendiri proses pemilihan umum pada tahun 2012.

Selama tahun 2012 Parlemen Nasional terus menunjukkan beberapa kemajuan yang signifikan termasuk pengesahan atas undang-undang penting seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Hak Mogok Kerja. Parlemen juga melakukan perubahan atas undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum melalui Rancangan Undang-Undang Pemilihan Parlemen Nasional dan Undang-Undang Pemilihan Presiden-Republik.

Parlemen Nasional juga mengesahkan tiga undang-undang penting lain seperti Paket Undang-Undang Pertanahan, Aturan Umum mengenai batasan Kepemilikan atas Tanah dan Undang-Undang tentang Anggaran untuk Benda-Benda Tidak Bergerak. Walaupun demikian ketiga undang-undang tersebut pada akhirnya diveto oleh Presiden.

JSMP juga memantau bahwa parlemen tidak sempat melakukan debat dan mengesahkan beberapa undang-undang penting diantaranya termasuk Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi, Rancangan Undang-Undang Reparasi dan Institut Memori Publik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Pensiun. Selain itu, JSMP akan terus memantau masalah-masalah yang terjadi di parlemen dan fungsi-fungsi regular parlemen termasuk bebepara anggota parlemen yang masih tetap menyalahi aturan Parlemen, terutama mengenai jam kerja.

Terlepas dari upaya-upaya yang dicapai para anggota parlemen, kegiatan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat masih sangat minim. Masyarakat belum memahami dengan baik tugas pokok dari lembaga-lembaga negara. Selain itu, parlemen dan pemerintah belum melakukan konsultasi yang meluas dan substantif dengan pihak – pihak yang relevan mengenai kebijakan perundang-undangan dan rancangan undang-undang.

Untuk terus menegakkan dan meningkatkan sebuah pemerintahan yang baik di Timor-Leste, maka JSMP merekomendasikan sebagai berikut:

1. Parlemen Nasional harus membentuk sebuah 'Program Legislatif Nasional' seperti di Negara-negara lain untuk menjamin bahwa kebijakan perundang-undangan sesuai dengan prioritas nasional untuk 5 tahun mendatang.

2. Parlemen Nasional harus mempertimbangkan rancangan undang-undang penting yang telah kadaluwarsa, termasuk rancangan undang-undang Institusi Memori Publik, Undang-Undang Reparasi Nasional dan Undang-Undang Anti Korupsi.

3. Parlemen Nasional perlu melakukan proses konsultasi yang terbuka, mendalam dan substansial dengan para pihak yang relevan mengenai rancangan undang-undang dan menjamin keterlibatan publik dalam proses legislatif untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mewadahi/mewakili aspirasi masyarakat, realitas aktual dan kepentingan nasional.

4. Parlemen Nasional harus menentukan sebuah panduan mengenai tata cara/proses yang tepat untuk menetapka proses penangguhan bagi anggota pemerintah sesuai dengan pasal 113.1 Konstitusi. Panduan ini harus menjelaskan bahwa penangguhan tersebut diterapkan sejak awal proses hukum dimulai (dari adanya pengajuan dakwaan) sampai proses tersebut selesai, termasuk sampai adanya upaya hukum banding.

5. Parlemen Nasional harus menerapkan sanksi berdasarkan pada Peraturan Internal Parlemen terhadap para anggota parlemen yang tidak disiplin terhadap jam kerja tanpa adanya justifikasi/pemberitahuan terlebih dahulu.

6. Parlemen Nasional perlu menyediakan dokumen, termasuk rancangan undang-undang, dalam dua versi resmi – Tetum dan Portugis agar dapat menfasilitasi pemahaman semua anggota parlemen dan juga diakses oleh publik.

7. Institusi yang menyiapkan rancangan undang-undang juga harus menyediakan penjelasan sederhana terhadap setiap pasal, agar dapat menfasilitasi pemahaman semua anggota parlemen dan juga diakses oleh publik.

8. Parlemen Nasional perlu menjamin adanya alokasi keuangan yang memadai untuk menambah penasehat nasional dan internasional, juga termasuk staf pendukung teknis bagi parlemen dan staff peneliti agar membantu tugas-tugas parlemen untuk lebih efektif.

9. Parlemen Nasional perlu menghindari pengeluaran yang tidak perlu pada setiap periode untuk membeli fasilitas yang sama, misalnya mobil baru bagi anggota parlemen.

10. Parlemen Nasional perlu menggunakan dengan baik alat komunikasi seperti radio, televisi untuk dapat menfasilitasi publik dan melakukan kampanye secara langsung, agar dapat membagi informasi kepada publik dengan lebih baik.

PENGANTAR

Pada bulan Februari 2010 JSMP mendirikan Proyek Pemantauan Parlemen Projetu Observasaun Parlamentu (POP). Proyek ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan dalam berkontribusi untuk mendirikan dan mempromosikan (melestarikan) sistem perpolitikan yang menyediakan ruang bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses penguatan demokrasi di Timor-Leste. Upaya-upaya tersebut dapat diwujudkan melalui:

1. Memantau kinerja Parlemen Nasional agar dapat menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien dan memajukan budaya transparansi dan akuntabilitas

2. Memajukan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang, peninjauan/ pengawasan dan dalam hal pengambilan keputusan politik, dan

3. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai tugas dan peranan utama dari lembaga-lembaga kedaulatan Negara, secara khusus Parlemen Nasional.

Laporan ini menguraikan dan mengarisbawahi kinerja Parlemen Nasional dalam proses pembuatan perundang-undagan, pengawasan dan dalam hal pengambilan keputusan politik berdasarkan pada hasil pemantauan yang dilakukan oleh JSMP selama tahun legislatif 2012, termasuk Periode Legislatif Kedua (23 Juli 2008 – 30 Juli 2012) dan Periode Legislatif Ketiga (30 Juli 2012 sampai sekarang). Laporan ini juga mendeskripsikan mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh JSMP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem dan proses berdemokrasi di Timor-Leste.

Struktur laporan ini adalah sebagai berikut:

Bagian 1 – Ringkasan mengenai Pemilihan Umum 2012.

Bagian 2 – Menggambarkan kegiatab Parlemen Nasional, termasuk membuat undang-undang dan resolusi-resolusi yang diterbitkan dan termasuk pengawasan terhadap program pemerintah.

Bagian 3 – Menggambarkan tantangan dan isu-isu yang dapat memberikan dampak negatif kepada sistem berdemokrasi selama tahun 2012.

Bagian 4 – Menggambarkan kegiatan JSMP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyebarluasan informasi mengenai parlemen dan sistem demokrasi.

Bagian 5 – Kesimpulan dan rekomendasi.

1. PEMILIHAN UMUM 2012

Secara umum, JSMP mencermati bahwa proses pemilihan Presiden dan para anggota Parlemen Nasioanl pada tahun 2012 berjalan dengan baik dan sukses. Dari hasil pemilihan Presiden pada tanggal 17 Maret 2012, Taur Matan Ruak terpilih sebagai Presiden baru untuk periode 2012–2017 menggantikan matan Presiden Republik Demokratik Timor-Leste José Manuel Ramos Horta. Dari pemilihan Parlemen pada tanggal 7 Juli 2012, Timor-Leste memiliki anggota parlemen baru sebanyak 65 orang dan membentuk sebuah pemerintahan koalisi yang melibatkan – CNRT, PD, dan Frenti Mudança – dengan Xanana Gusmão selaku Perdana Menterinya.

Sementara pemilihan parlemen berjalan dengan baik dan sukses dan tidak ada konflik yang besar, namun kerusuhan kecil di Dili dan distrik lain terjajdi setelah masyarakat mendapatkan hasil dari pemilihan tersebut. Di ibukota Dili, seorang pelajar di Hera tertembak mati pada tanggal 15 Juli 2012 dan salah seorang anggota PNTL dituduh sebagai pelaku penembakan terhadap pelajar tersebut. JSMP telah mendesak sebuah proses investigasi yang transparan atas tuduhan pembunuhan tersebut.[1] Kasus ini telah diproses di Pengadilan Distrik Dili dan telah melakukan proses persidangan pertama pada tanggal 4 Maret 2013. Proses terhadap kasus ini masih tetap berjalan.

Para pemantau nasional maupun internasional memantau secara langsung pemilihan ini dan komunitas internasional mengakui bahwa demokrasi terus diperkuat di Timor-Leste. Kesuksesan dalam pemilihan ini juga berarti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Misi Transisi (UNMIT) dapat mengakhiri misinya di Timor-Leste setelah 10 tahun menjalankan tugasnya di Timor-Leste.

JSMP menilai bahwa selama waktu kampanye sampai pada 'penghitungan suara', Komisi Pemilihan Nasional (CNE) menerima pengaduan dan tuduhan penyimpangan kecil mengenai hasil pemilihan. Misalnya, dalam pemilihan parlemen CNE menerima pengaduan sebanyak 89 dari 13 distrik. Dari total suara pengaduan tersebut semuanya mendapatkan jawaban yang baik secara langsung dari CNE dan pada akhirnya semua partai politik menerima.

CNE telah melimpahkan semua berkas pengaduan tersebut ke pengadilan mengenai calon-calon Presiden dan beberapa partai yang yang diduga menyalahgunakan dana, fasilitas publik, mobil pemerintah, memanfaatkan anak-anak dalam selama kegiatan kampanye, termasuk sebagian kelompok mendeklarasikan dirinya keluar dari sebuah partai dan kemudian memberikan dukungan pada calon presiden dari partai lainnya.

JSMP menyambut baik kinerja CNE karena sukses dalam menjalankan Pemilihan Umum 2012, setelah menerima tanggungjawab dari Sekretaris Teknis Administrasi Pemilihan UNMIT untuk mengorganisir sendiri proses pemilihan umum pada tahun 2012.

[1] Siaran Pers JSMP, 'JSMP mendesak proses investigasi yang transparan atas tuduhan kasus pembunuhan oleh anggota Polisi Nasional Timor Leste di Hera' (20 Juli 2012): <www.jsmp.tl>

2. KEGIATAN PARLEMEN NASIONAL

A. Kemajuan Legislatif

Parlemen Nasional menunjukan beberapa perkembangan yang signifikan dalam bidang legislasi, pengawasan dan kemajuan di tingkat kebijakan politik. Parlemen juga berusaha untuk menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien sesuai dengan mandat mereka.

Pada tahun 2012 Parlemen Nasional berhasil mengesahkan beberapa undang-undang penting seperti Undang-Undang Hak atas Mogok, Rancangan Undang-Undang Paket Pertanahan dan usulan perubahan atas Undang-Undang Pemilihan untuk Presiden dan Undang-Undang Pemilihan Parlemen.

Pada tahun 2011 parlemen berhasil mengesahkan 18 produk undang-undang, akan tetapi di tahun 2012 parlemen hanya bisa mengesahkan 10 produk undang-undang. Diakui bahwa pemilihan parlemen 2012, mengganggu program parlemen akan tetapi perlu dipertanyakan apakah para anggota parlemen telah menggunakan waktu mereka secara efektif dalam hal legislatif. Tabel 1 menunjukan daftar undang-undang yang disahkan pada tahun 2012.

Tabel 1: Undang-Undang yang disahkan pada tahun 2012

Nama Undang-Undang	Tanggal masuk	Tanggal pengesah-an akhir	Tanggal pengunda-ngan	Pemilihan		
				Setuju	Tidak setuju	Abstain
UU No. 5/2012: mengenai Hak Atas Mogok	30/05/2011	16/01/2012	17/02/2012	28	1	6
UU No. 6/2012: mengenai Skema Transisi Keamanan Sosial pada Usia Lanjut (orang tua), orang cacat dan pegawai pemerintahan yang meninggal dunia	06/06/2011	25/01/2012	17/02/2012	37	0	2
UU No. 3/2012: mengenai Materi Lingkungan	13/12/2011	13/12/2011	12/01/2012	23	1	10
UU No. 1/2012: Perubahan Ketiga atas UU No. 6/2006 mengenai Pemilihan Parlemen Nasional	03/01/2012	05/01/2012	12/01/2012	32	17	1
UU No. 2/2012: Perubahan atas UU No. 7/2006 mengenai Pemilihan Presiden	03/01/2012	5/01/2012	12/01/2012	24	16	2
UU No. 7/2012: Perubahan Keempat atas UU No. 7/2006: mengenai Pemilihan Presiden	01/03/12	01/03/12	01/03/2012	44	0	0
Rancangan UU No. 34/II: mengenai Skema Khusus Pengertian Benda tidak Bergerak (Paket UU Pertanahan)	06/04/2010	08/02/2012	20/03/2012	28	5	2
Rancangan UU No. 35/II mengenai UU Penggusuran (Paket UU Pertanahan)	06/04/2010	13/02/2012	20/03/2012	37	13	1
Rancangan UU No. 36/II mengenai Anggaran untuk Barang-Barang tidak Bergerak (Paket UUU Pertanahan)	06/04/2010	13/02/2012	20/03/2012	27	8	3

UU No. 8/2012 Perubahan Pertama UU No. 16/2011, 21 Desember, tentang pengesahan Anggaran Belanja Negara 2012 (Ratifikasi)	14/09/2012	17/10/12	25/10/2012	40	25	0

Parlemen Nasional juga mengesahkan Paket Rancangan Undang-Undang Pertanahan pada bulan Februari 2012. Akan tetapi Presiden mem-veto Paket Rancangan Undang-Undang Pertanahan tersebut karena menerima banyak rekomendasi dari masyarakat madani (LSM) bahwa Parlemen Nasional tidak melakukan konsultasi secara memadai dengan masyarakat. Selain itu isi dari rancangan undang-undang ini sendiri tidak merefleksikan realitas atau konteks dari Timor-Leste. Pada tahun 2013 Kementerian Kehakiman mulai membuka kembali proses konsultasi dengan masyarakat untuk mendengarkan pandangan pihak terkait dan rekomendasi dari masyarakat madani terutama mereka yang memiliki konflik dengan undang-undang tersebut. JSMP berharap proses konsultasi ini bisa menghasilkan sebuah undang-undang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat dan adil.

Parlemen Nasional tidak sempat melakukan debat dan mengesahkan undang-undang penting, termasuk Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi, Rancangan Undang-Undang Reparasi dan Institusi Memori Publik. Undang-undang tersebut tertunda sejak tahun 2011 dan telah kadaluarsa. JSMP memantau bahwa para anggota parlemen tidak serius untuk mendiskusikan undang-undang yang tidak memberikan keuntungan politik terhadap mereka. Misalnya, Rancangan Undang-Undang Reparasi dan Institusi Memorial Publik mendapatkan perlawanan keras dari para anggota parlemen yang nota bene adalah anggota veteran dengan melakukan usulan perubahan atas kedua undang-undang tersebut tanpa adanya justifikasi secara jelas.

Tabel 2: Rancangan undang-undang yang kadaluarsa pada tahun 2012

Undang-Undang	Tanggal masuk
Rancangan UU No. 30/II: Perubahan Ke-empat atas UU No. 6/2006 mengenai Pemilihan Parlemen Nasional	23/04/2012
Rancangan UU No. 27/II: Perubahan Pertama atas UU No. 11/2008, mengenai Undang-Undang Pengacara Pribadi dan Pelatihan bagi Pengacara	5/03/2012
Rancangan UU No. 29/II: Perubahan UU No. 1/2007 mengenai Pensiunan bulanan seumur hidup bagi para anggota parlamen dan hak-hak istimewa lainnya atas UU No. 7/2007 mengenai Kedudukan para Lembaga-Lembaga Kedaulatan Negara	13/02/2012
Rancangan UU No. 21/II mengenai Anti Korupsi	08/11/2011
Rancangan UU No. 18/II, Undang-Undang Pemerintahan Lokal	18/02/2009
Rancangan UU No. 20/II mengenai Pendirian Institusi Memorial Publik	16/06/2010
Rancangan UU No. 19/II mengenai Program Nasional untuk Reparasi	16/06/2010
Rancangan UU No. 9/II, UU mengenai Kepemilikan Senjata	02/04/2008
Rancangan UU No. 19/II, UU mengenai Pemilihan Kota Madya	18/02/2008

REKOMENDASI 1

Parlemen Nasional harus mendirikan sebuah 'Program Legislatif Nasional' seperti Negara-negara lain untuk menjamin bahwa kebijakan perundang-undangan sesuai dengan prioritas nasional untuk 5 tahun mendatang.

REKOMENDASI 2

Parlemen Nasional harus mempertimbangkan kembali rancangan undang-undang penting yang telah kadaluwarsa, termasuk rancangan undang-undang Institusi Memori Publik, Undang-Undang Reparasi dan Undang-Undang Anti Korupsi.

REKOMENDASI 3

Parlemen Nasional perlu melakukan proses konsultasi yang meluas, mendalam dan substantif dengan para pihak yang relevan mengenai rancangan undang-undang dan menjamin keterlibatan publik dalam proses legislatif untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mewakili aspirasi masyarakat, realitas aktual dan kepentingan nasional.

B. Resolusi Parlemen

tahun 2012 Parlamen Nasional membuat keputusan-keputusan yang sangat penting melalui Resolusi Parlamen seperti Resolusi untuk menangguhkan hak kekebalan/imunitas dari Menteri Kehakiman dan Menteri Administrasi Negara dan Perencanaan Teritorial. Resolusi-resolusi tersebut memaksa mereka untuk menjawab tuduhan mengenai korupsi.

Penangguhan terhadap Menteri Kehakiman Lúcia Lobato

Tanggal 9 Februari 2012 Pengadilan Distrik Dili mengajukan permohonan pada Parlemen Nasional untuk mencabut kekebalan hukum dari Menteri Kehakiman Lúcia Maria Brandão Lobato sehingga dapat mengikuti persidangan atas kasus pidana penyalahgunaan wewenang berat dan tindak pidana partisipasi ekonomi.

Permohonan untuk menangguhkan kekebalan dari Menteri Lobato diajukan ke Komisi I Parlemen Nasional pada tanggal 2 Maret 2012. Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan sampai pada tanggal 24 Maret 2012 karena menunggu resolusi dari Parlemen.

Pada tanggal 20 Maret 2012 Komisi I menyimpulkan bahwa parlemen harus mencabut kekebalan dari Menteri Kehakiman. Parlemen Nasional meloloskan Resolusi No. 87/II dengan mencabut kekebalan hukum dari Lobato. Resolusi ini mengatakan bahwa: “Parlemen Nasional berkeputusan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 113 Konstitusi, sebagai berikut: menangguhkan menteri kehakimman dari jabatannya untuk bisa melanjutkan kasus dengan No. 622/C.Ord/2011/TDD dengan efeknya segera.”

Pada tanggal 21 Maret 2012 Resolusi No. 87/II ini diterbitkan dalam Lembaran Negara. Resolusi ini menangguhkan Menteri dengan efek segera, bukannya penangguhan tersebut ditunda hingga tanggal persidangan. Walaupun demikian, pada tanggal 2 April 2012 Parlemen Nasional mengadakan sebuah perdebatkan atas sebuah Rancangan Resolusi No. 89/II untuk mengamandemen Resolusi No. 87/II sebelumnya dan menunda penangguhan sampai pada tanggal persidangan. Parlemen tidak dapat membahas untuk meloloskan resolusi ini karena tidak memenuhi kworum.

Pada tanggal 23 April Perdana Menteri mengambil-alih tanggungjawab dan wewenang sebagai Menteri Kehakiman.

JSMP telah mencermati melalui laporan JSMP yang berjudul “Hak Istimewa dan Kekebalan Parlemen di Timor-Leste: Bagaimana Menjamin Adanya Persamaan di depan Hukum?”. Bahwa memang ada kebingungan mengenai prosedur yang benar untuk mencabut hak kekebalan anggota pemerintah. JSMP

telah merekomendasikan bahwa Parlemen Nasional perlu melakukan klarifikasi mengenai prosedur penangguhan terhadap para anggota pemerintah sesuai dengan Konstitusi. Parlemen Nasional juga bisa menjelaskan bahwa penangguhan ini dapat diterapkan dari awal sesuai dengan proses hukum (dimulai dari surat dakwaan diserahkan) sampai proses tersebut berakhir, termasuk hingga proses banding jika dilakukan.

Pengangguhan terhadap Menteri Negara Perencanaan Teritorial

Pada tanggal 11 Juni 2011 Pengadilan Distrik Baucau mengajukan permohonan kepada Parlemen Nasional untuk mencabut kekebalan Menteri Negara Perencanaan Teritorial agar dapat mengikuti persidangan atas dakwaan pidana pengelolaan yang tidak benar (*adminstrasaun denoza*) dengan Nomor Perkara: 141 Crm.C/2010.TD.BCU.

Permohonan ini bermaksud untuk menanggguhkan kekebalan dari Menteri Arcângelo Leite yang dirujuk ke Komisi I Parlemen Nasional pada tanggal 21 Juni 2011. Parlemen Nasional kemudian menetapkan jadwal sidang pleno untuk mencabut kekebalan hukum Menteri Arcângelo Leite akan tetapi tidak dapat dilakukan hingga Maret 2012, kurang lebih 12 bulan.

Pada tanggal 27 Maret 2012 Parlemen Nasional menjadwalkan kembali sidang pleno Parlamen untuk mempersoalkan Resolusi No. 70/II mengenai penangguhan Menteri Arcângelo Leite karena dianggap usulan/nasihat dari Komisi I Parlamen Nasional tidak menentukan tanggal persidangan yang pasti atas Menteri Arcângelo Leite.

Pada tanggal 2 April 2012 Parlemen Nasional kembali mere-agendakan sidang pleno untuk membahas Resolusi No. 70/II tersebut, akan tetapi tetap tidak memenuhi kworum. Pembahasan mengenai resolusi ini ditunda untuk kedua kali – parlemen menentukan untuk memutuskan pada tanggal 3 dan 10 April 2012, akan tetapi tetap tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi kworum.

Parlemen Nasional baru mengesahkan Resolusi No. 7/II untuk mencabut kekebalan dari Menteri Arcângrlo Leite pada tanggal 23 April 2012 melalui sebuah pemilihan yang bersifat rahasia dengan hasil: setuju 42, tidak setuju 1 abstain 1. Resolusi ini secara resmi dipublikasikan di Lembaran Negara pada tanggal 2 Mei 2012.

Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangannya sampai pada tanggal 20 Juni 2012 – selama 1 tahun dari permintaan awalnya – karena parlemen gagal untuk memenuhi kewajibannya.

Berikut tabel 3 ini akan menguraikan resolusi-resolusi yang disahkan pada tahun 2012.

Tabel 3: Resolusi-resolusi yang disahkan pada tahun 2012

Resolusi	Tanggal masuk	Tanggal pengesahan	Pemilihan		
			Setuju	Tidak setuju	Abstain
Resolusi No. 1/2012 mengenai Perjalanan Presiden ke Jepang dan Amerika Serikat	10/01/2012	10/01/2012	28	2	9
Resolusi No. 2/2012 mengenai Perjalanan Presiden ke Amerika Serikat	24/01/2012	24/01/2012	24	2	3
Resolusi No. 3/2012 mengenai Biaya Perjalanan para Anggota Parlemen ke luar negeri	25/01/2012	25/01/2012	32	1	1
Resolusi No. 4/2012 mengenai Traktat Persahabatan dan Hubungan Bilateral dengan Asia Tenggara	16/01/2012	30/01/2012	38	0	2

Resolusi	Tanggal masuk	Tanggal pengesahan	Pemilihan		
			Setuju	Tidak setuju	Abstain
Resolusi No. 5/2012 mengenai Perjalanan Presiden ke Amerika Serikat	14/02/2012	14/02/2012	36	0	7
Resolusi No. 6/2012 mengenai Komersialisasi Minuman Beralkohol dan Bahan Bakar	24/01/2012	25/01/2012	29	0	4
Resolusi No. 7/2012 mengenai Penangguhan Jabatan Menteri Kehakiman untuk mengikuti persidangan dengan No. Perkara: 622/2011.TDDIL sesuai dengan Pasal 113 (1) Konstitusi RDTL	13/03/2012	20/03/2012	36	0	3
Resolusi No. 8/2012 mengenai Situasi di Guine Bissau	23/04/2012	23/04/2012	40	0	0
Resolusi No. 9/2012 mengenai Penangguhan Jabatan Meteri Negara Perencanaan Teritorial-Arcângelo de Jesus Goveia Leite	21/06/2011	23/04/2012	42	1	1
Resolusi No. 10/2012 mengenai Rehabilitasi atas para pejuang yang meninggal dunia dan mendapatkan penyiksaan selama perjuangan	18/05/2012	18/05/2012	31	1	3
Resolusi No. 11 mengenai Pengakuan/Pemberian Gelar Kehormatan kepada para pendukung perjuangan kemerdekaan nasional baik untuk institusi dan sebagai warga negara	18/05/2012	18/05/2012	31	0	3
Resolusi No. 13/2012 mengenai perjalanan Presiden Republik ke Mozambique	13/07/2012	13/07/2012	46	0	0
Resolusi No. 14/2012 mengenai Pemilihan Kelompok Nasional dari Parlemen Nasional untuk Majelis Parlemen negara-negara CPLP	14/08/2012	21/08/2012	58	0	1
Resolusi No. 1/III/1a Partisipasi Parlemen Nasional di Uni Inter Parlementer (UIP)	14/08/2012	21/08/2012	55	3	2
Resolusi No. 2/III/1a Pemilihan Delegasi Parlemen Nasional untuk Uni Inter Parlementer (UIP)	14/08/2012	21/08/2012	58	0	1
Resolusi No. 5/III/1[a] mengenai Bank Umum Negara 2011	11/12/2012	11/12/2012	60	0	2

REKOMENDASI 4

Parlemen Nasional harus membuat sebuah panduan mengenai tata cara/proses yang tepat untuk menformalisasi penangguhan bagi anggota pemerintah sesuai dengan pasal 113.1 Konstitusi. Panduan ini harus menjelaskan bahwa penangguhan tersebut diterapkan sejak awal proses hukum dimulainya (dari adanya dakwaan) sampai proses tersebut selesai, termasuk sampai adanya upaya hukum banding.

C. Pengawasan

Pengawasan berarti para anggota parlemen melihat/mengamati secara dekat program pemerintah dalam komunitas sehubungan dengan pelaksanaan program pembangunan yang sedang dijalankan di daerah

seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian. Para anggota parlemen menyampaikan hasil dari pengawasan ini dalam sidang pleno sebelum melakukan perdebatan legislatif.

Pada tahun 2012 para anggota parlemen terus menyampaikan kritik substantif mengenai program dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa parlemen mengerti dengan baik tanggungjawab mereka sesuai dengan Konstitusi untuk mewakili semua golongan masyarakat Timor-Leste dan melakukan kontrol atas kekuasaan pemerintah. JSMP merekomendasikan kepada para anggota parlemen untuk terus melakukan pengawasan dengan benar terutama mengenai pengelolaan keuangan dalam kegiatan pemerintah.

Walaupun para anggota parlemen ini telah berusaha untuk melakukan kritik atas kegiatan pemerintah, namum belum ada mekanisme di parlemen untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh pemerintah atas isu-isu yang diangkat oleh para anggota parlemen. Misalnya, korban bencana alam, kebakaran yang mengakibatkan rumah masyarakat di Kelikai terbakar, bencana alam dan angin kencang yang rumah-rumah masyarakat di Aituto Distrik Ainaro rusak, dan kemudian mendapatkan bantuan emergensi seperti makanan dan fasilitas bangunan secara langsung dari Kementerian Solidaritas Sosial, akan tetapi para anggota parlemen tidak memantau situasi ini.

Berikut adalah contoh-contoh kritikan substantif yang disampaikan oleh anggota parlemen dalam diskusi selama tahun 2012.

Kritik mengenai air bersih dan sanitasi

- Masyarakat tetap kekurangan air bersih di Dili dan di daerah terpencil

Antonino Bianco (Fretilín)

Kritik mengenai pendidikan

- Pegawai negeri selalu menerima gajinya tidak tepat waktu
- Sebagian sekolah di Dili mengalami kekurangan kursi dan meja
- Makanan di sekolah yang disediakan tidak memiliki kualitas
- Bencana alam yang merusak sekolah di Hatobuiliko termasuk salah satu sekolah di Aituto dan Mauchiga (Ainaro)

Virginia Belo, Romeo Moises (CNRT); Adriano Nascimento (PD);
Ilda da Conceicao, Estanislau da Silva (Fretilín); Françisco de Araújo (ASDT)

Kritik mengenai kesehatan

- Kekurangan persediaan obat di Rumah Sakit Dili dan Baucau
- Penyakit demam berdarah yang meningkat tajam
- Fasilitas tidak cukup di Rumah Sakit
- Masalah listrik yang selalu padam di Rumah Sakit

Paulo Martins, Natalino dos Santos (CNRT); Antonino Bianco (Fretilín);
Agusto Tara, Adriano do Nacimento (PD)

Kritik mengenai listrik

- Pusat Perlistrikan baru belum berfungsi
- Masalah perlistrikan di Dili

Fernanda Borges (PUN); Inacio Moreira (Fretilín)

Kritik mengenai jalan raya

- Jalan Raya Turiscai, Ermera, Aituto-Maubisse dan Atsabe rusak berat, dan jalan raya ke Hatolia dan Cailaco juga terputus
- Bagian Timur jalan raya Laleia dan Viqueque rusak berat dan rehabilitasi jalan raya di Dili yang tidak memiliki kualitas

Teresa Amaral (ASDT); Mateus de Jesus (INDEPENDENTE);
Domingos Sarmento, Joaquim dos Santos, David dias Ximenes
no Inácio Moreira (Fretilín); Getrudes Moniz (PD)

Kritik mengenai pertanian

- Kayu Cendana di Tilómar mati karena rumput tidak dibersihkan, beras dan jagung di tempat penampungan rusak di Metiaut Dili

David Dias Ximenes, Inácio Moreira (Fretilín);
Adriano do Nascimento, Getrudes Moniz (PD)

Kritik mengenai pemeriksaan dan keamanan

- Di perbatasan Suai, Bobonaro dan Oe-Cusse Polisi UPF memiliki fasilitas komunikasi yang sangat minim
- Mempertanyakan tindakan Task Force PNTL yang secara sembarangan memukul orang dan kasus polisi mengancam anak kecil dengan pistol
- Masalah lalu-lintas di Dili

Adriano Nascimento, Rui Menezes (PD); Paulo Martins (CNRT)

Kritik mengenai keamanan sosial

- Memberikan tunjangan untuk keluarga para pegawai negeri
- Mencurigai adanya manipulasi atas verifikasi data veteran - diminta untuk melakukan verifikasi ulang
- Pembayaran terhadap kelompok usia lanjut tidak transparan
- Menuntut dukungan sosial untuk para korban bencana alam di Desa Mape dan Lepo

Domingos Sarmento, Inácio Moreira no Francisico Jerónimo (Fretilín);
Rui Menezes, Adriano João (PD); Fernanda Borges (PUN):
Natalino dos Santos (CNRT); Maria Teresa Exposto (PSD);
Mateus de Jesus (INDEPENDENTE)

JSMP mengamati selama tiga tahun terakhir parlemen sangat sulit untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari anggota pemerintah atas apa yang menjadi keprihatinan mereka. Untuk memfasilitasi lebih baik hubungan antara pemerintah dan parlemen, pada tahun 2012 pemerintah memilih Sekretaris Negara untuk urusan Parlementer, Maria Terezinha Viegas yang akan bekerja lebih dekat dengan para anggota parlemen dengan tujuan untuk mengumpulkan semua informasi, pertanyaan, keprihatinan dan masukan dari semua anggota parlemen sehingga dapat dijawab secara langsung dari pemerintah.

Misalnya pada tanggal 13 dan 26 November, dan pada tanggal 17 Desember 2012 Presiden Parlemen Nasional memberikan waktu kepada Sekretaris Negara untuk Urusan Parlementer untuk membacakan justifikasi dari Menteri Negara Perencanaan Teritorial mengenai Proyek Pembangunan tingkat distrik/daerah di Desa Tilomar, Distrik Covalima. Sekretaris Negara untuk Parlamen ini menyampaikan jawaban dari Sekretaris Presiden Komisi Kepegawaian (*Komisaun Funsaun Públiku*) mengenai proses pendisiplinan untuk para pegawai negeri, dan menjawab pertayaan Sekretaris Negara untuk Pertahanan mengenai operasi UNPOL dan FSI yang telah berakhir pada tahun 2012. Dia juga membacakan informasi dari Kementerian Solidaritas Sosial mengenai pembayaran bagi para korban di Desa Zumalai.

JSMP berpandangan bahwa sarana komunikasi yang didirikan antara parlemen dan pemerintah ini sangat baik dan berharap hubungan ini dapat dilanjutkan di masa yang akan datang guna memaksa pemerintah untuk menjawab semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

D. Kegiatan lainnya

Pada tahun 2012 Parlemen Nasional mengadakan sidang pleno luar biasa sebanyak 23 kali. Parlemen Nasional juga mengadakan dengar pendapat di tahun 2012 termasuk sidang dengar pendapat seperti berikut ini:

- 8 Februari 2012 – Sidang dengar pendapat dengan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão yang didampingi oleh Menteri Pendidikan João Cancio Freitas serta para anggota pemerintahan lainnya berhubungan dengan presentasi proyek percobaan (*pilot project*) penerapan bahasa ibu.
- 27 Februari 2012 – Menerima surat dan mendengarkan pesan dari Presiden José Manuel Ramos Horta, mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- 13 Maret 2012 – Sidang dengar pendapat dengan Kejaksaan Agung Republik untuk mendengar laporan tahunan atas kinerja pihak Kejaksaan.
- 30 Juli 2012 – Periode Legislatif II, mengakhiri mandatnya dan memasuki periode Legislatif III menerima mandat baru.
- 31 Juli 2012 – Parlemen memilih Vicente Guterres sebagai Presiden III Parlemen Nasional dengan total suara setuju 40, tidak setuju 4, abstain 7 dan kosong 13 untuk menggantikan posisi Fernando Lasama de Araujo, Presiden Parlemen II.
- Tanggal 13 Agustus 2012 – Parlemen Nasional periode Legislatif III menerima permohonan pergantian sementara dari Anggota Parlemen Dionísio D. C. Babo Soares (CNRT), Anggota Parlemen Ricardo Cardoso Nheu (Frenti Mudança), Anggota Parlemen António da Conceição dan Samuel Mendonça (PD), kerena menerima jabatan baru sebagai anggota pemerintahan.
- Tanggal 15, 16 dan 17 Oktober 2012 – Parlemen Legislatif III melakukan sidang dengar pendapat dengan Pemerintah V dengan membahas dan mengesahkan Perubahan Anggaran negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão dengan didampingi oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan.
- Tanggal 24 Oktober 2012 – Parlemen menerima masukan mengenai laporan usulan dari Pengadilan Tinggi mengenai Anggaran Negara 2011.

- Tanggal 27 Agustus 2012 – Parlemen menerima surat dari Utusan Khusus Sementara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste, mengenai kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki Moon dan delegasinya di Timor-Leste.
- Tanggal 3 Desember 2012 – Sidang dengar pendapat dengan Wakil Menteri Keuangan Santina Cardoso dan Sekretaris Negara Untuk Urusan Parlementer, Maria Terezinha Viegas mengenai dana perminyakan.

Pada tanggal 21 Mei 2012, parlemen menerima kunjungan resmi dari Presiden Portugal Aníbal Cavaco Silva dalam sidang pleno, untuk mendengarkan komitmen Portugal untuk membantu Timor-Leste di masa yang akan datang. Pada tanggal 15 Agustus 2012, Parlemen menerima kunjungan resmi dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki Moon untuk menjelaskan misi UNMIT yang akan berakhir di Timor-Leste. Pada tanggal 30 November 2012 parlemen juga menerima kunjungan resmi Presiden Cabo Verde Jorge Carlos Fonseca untuk mendengar mengenai kebijakan hubungan antara negara-negara yang berbicara bahasa Portugis.

Pada tanggal 5, 7, 10 dan 11 September 2012, anggota Parlemen Nasional baru menerima pelatihan mengenai perihal penerimaan dari mantan Presiden Parlemen Portugal dan Cavo Verde, Jaime Gama dan Aristides Lima, mengenai tugas dan tanggungjawab dari para anggota parlemen termasuk kompetensi Presiden Parlemen Nasional, sesi pleno, agenda, musyawarah dan pemunggutan suara.

Pada tanggal 17 Oktober 2012 parlemen mulai melakukan debat atas rancangan Anggaran Ratifikasi. Rancangan ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran US$50 juta untuk program pemerintah di tahun 2012. JSMP menilai hahwa pengalokasian anggaran ratifikasi ini tidak seimbang karena sektor pendidikan hanya mendapatkan suntikan dana sebesar US$1.7 juta jika dibandingkan dengan anggaran pensiunan untuk para veteran yang berjumlah US$26.9 juta dan untuk para lanjut usia berjumlah US$7 juta.

E. Komisi A

Komisi A Parlemen Nasional menjalankan tugasnya mengenai Konstitusi, peradilan, administrasi publik, kewenangan lokal dan perundang-undangan. Komisi A memiliki kewenangan sepenuhnya sesuai dengan pasal 95 Konstitusi untuk memantau pekerjaan pemerintah melalui perdebatan dan memberikan pertanyaan tertulis kepada pemerintah.

Pada tahun 2012, Komisi A berfokus pada Paket Undang-Undang Pertanahan yang diserahkan oleh sidang pleno kepada Komisi A pada tanggal 6 April 2010. Tabel 4 menjabarkan proses diskusi mengenai undang-undang ini.

Tabel 4: Proses diskusi Rancangan Paket Undang-Undang Pertanahan di Komisi A

Tanggal	Diskusi
06/04/2010	Parlemen Nasional menerima Usulan Paket Undang-Undang Pertanahan dan merujuk ke Komisi A.
03/01/2012	Komisi A menyiapkan jadwal untuk melakukan diskusi terhadap Usulan Paket Undang-Undang Pertanahan.
09/01/2012 - 26/01/2012	Komisi A mulai melakukan pembahasan dan melakukan pemunggutan suara secara spefisik *(votasaun espesialidade)* di Liquica, di balai pertemuan Susteran Carmelitas Maubara.
14/02/2012	Komisi A melakukan pemunggutan suara terhadap Usulan Paket Undang-Undang Pertanahan di ruang Komisi A Parlemen Nasional. JSMP tidak dapat memperoleh hasil pemunggutan karena Presiden dan Wakil Preiden Komisi tidak mengijinkan.

JSMP mengakui bahwa Komisi A mencoba untuk mendengarkan langsung pendapat, komentar dan saran dari publik dan semua pihak yang berkepentingan mengenai Usulan Paket Undang-Undang Pertanahan. JSMP mencatat juga bahwa Komisi A menerima usulan udang-undang ini pada bulan April 2010 namun Komisi tidak mendiskusikannya sampai bulan Januari 2012. Meskipun Komisi A memiliki prioritas lain untuk ditangani, namun JSMP mendorong para anggota Parlemen untuk memprioritaskan undang-undang yang telah diserahkan oleh sidang pleno kepada Komisi, agar tidak membiarkan tertunda sampai satu tahun lamanya.

Komisi A juga melakukan dengar pendapat dengan badan pemerintah yang relevan seperti Kementerian Negara untuk Perencanaan Teritori dan Sektariat Teknik Administrasi Pemilu, Komisi Nasional untuk Pemilihan Umum dan perwakilan dari LSM mengenai Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Parlemen. Komisi A juga menerima pengaduan dari korban bencana alam dari Distrik Viqueque.

Tabel 5: Kegiatan lain di Komisi A

Tanggal	Diskusi
05/01/2012	Pengesahan akhir terhadap Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Perubahan ketiga atas Undang-Undang Pemilihan Parlemen Nasional
23/04/2012	Menerima korban bencana alam dari Distrik Viqueque, kampung Betulari
24/04/2012	Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Parlemen
24/04/2012	Melakukan pertemuan dengan Kementerian Administrasi Negara dan Perencanaan Teritorial
26/04/2012	Mengesahkan laporan usulan Undang-Undang mengenai Pemilihan Parlamen Nasional

3. HAMBATAN-HAMBATAN

A. Kehadiran yang tidak teratur dari anggota parlemen

Pasal 46.2 Peraturan Parlemen menentukan bahwa jadwal kerja normal adalah dari jam 9 sampai jam 12.30 untuk sesi pagi hari dan sesi sore hari dimulai pada pukul 3 sampai jam 6 sore hari.

Beberapa anggota Parlemen terus tidak mematuhi peraturan ini. Para anggota Parlemen yang tidak mematuhi jam kerja tersebut memberikan dampak yang besar terhadap pekerjaan dan jalannya parlemen. Ketidakpatuhan ini meyebabkan tidak konsisten dengan agenda dan terpaksa menentukan agenda luar biasa.

Sebagaimana dipantau oleh JSMP pada tahun sebelumnya, ketidakpatuhan ini terus terjadi karena tidak ada tindakan yang tegas dari meja parlemen untuk memberikan sanksi kepada anggota Parlemen yang melanggar peraturan ini. Misalnya sesuai dengan pasal 10(e), anggota Parlemen harus memberikan justifikasi terhadap setiap ketidakhadiran pada setiap sidang pleno atau pertemuan komisi dengan batas waktu lima hari setelah kejadian ini. Namun anggota Parlemen tidak mematuhi kewajiban mereka dan mereka tidak masuk kerja tanpa ada justifikasi.

Hal ini menjadi persoalan serius bagi JSMP karena memberikan dampak besar terhadap sidang pleno dan proses perundang-undangan di Parlamen Nasional.

Tabel di bawah adalah kehadiran anggota Parlemen selama Januari – Mei 2012 (Periode Legislatif Kedua) setelah Agustus – Desember 2012 (Periode Legislatif Ketiga) berdasarkan pemantauan JSMP.

Tabel 6: Kehadiran anggota parlemen pada sidang pleno – Januari sampai Mei 2012 (Periode Legislatif Kedua)

Fraksi-Fraksi	Januari	Februari	Maret	April	Mei
Fretilin (21)	58%	57%	57%	68%	68%
CNRT (18)	71%	72%	62%	38%	38%
PD (8)	63%	59%	36%	71%	71%
PSD (6)	68%	71%	67%	56%	56%
ASDT (5)	42%	53%	38%	13%	12%
UNDERTIM (2)	55%	75%	56%	58%	58%
PUN (2)	40%	88%	83%	42%	42%
Independente (1)	70%	50%	89%	33%	33%
KOTA (1)	30%	75%	11%	67%	67%
PPT (1)	60%	0%	0%	0%	0%

Pada awal tahun 2012, Presiden Parlemen Nasional menghimbau kepada semua anggota Parlemen untuk masuk kerja dengan disiplin. Presiden Komisi A, Fernanda Borges juga mengatakan bahwa partisipai dari anggota parlemen masih minim, oleh karenanya seringkali tidak memenuhi kworum dan harus menunda diskusi atas beberapa undang-undang penting.

Meskipun JSMP memahami bahwa seringkali anggota Parlemen memiliki kegiatan lain yang mereka harus tangani, namun JSMP berpendapat bahwa kehadiran di sidang pleno, terlebih selama pemunggutan suara

adalah sangat penting untuk mematuhi kewajiban sesuai dengan Konstitsusi. Publik harus mempertanyakan janji para anggota parlemen dan efektifitas parlemen jika situasi ini terus terjadi.

Grafik 1: Separuh dari kehadiran setiap partai di pleno – Januari sampai Mei 2012

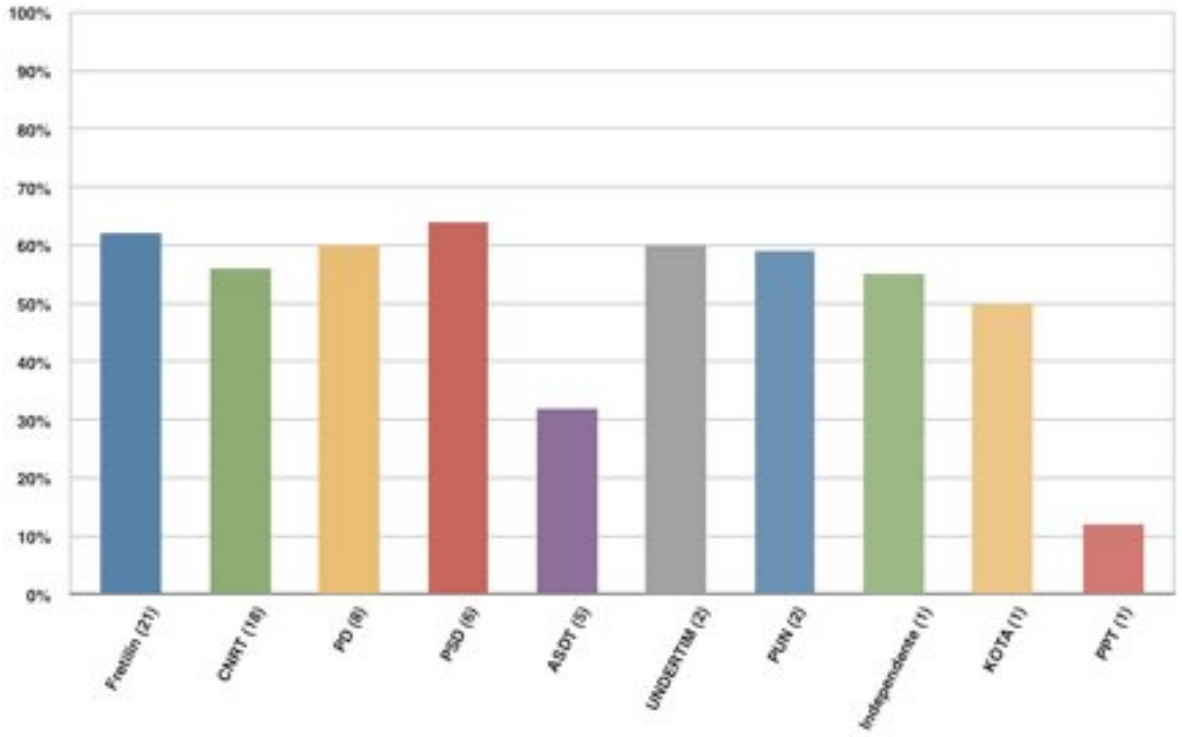

Tabel 7: Kehadiran anggota parlemen di sidang pleno – Agustus sampai Desember 2012 (Periode Legislatif Ketiga)

Fraksi-Fraksi	Agustus	September	Oktober	November	Desember
CNRT (30)	78%	80%	73%	59%	66%
Fretilín (25)	77%	74%	73%	56%	64%
PD (8)	79%	92%	79%	61%	64%
Frenti Mudança (2)	75%	85%	83%	61%	71%

Grafik 2: Separuh kehadiran setiap partai pada sidang pleno — Agustus sampai Desember 2012

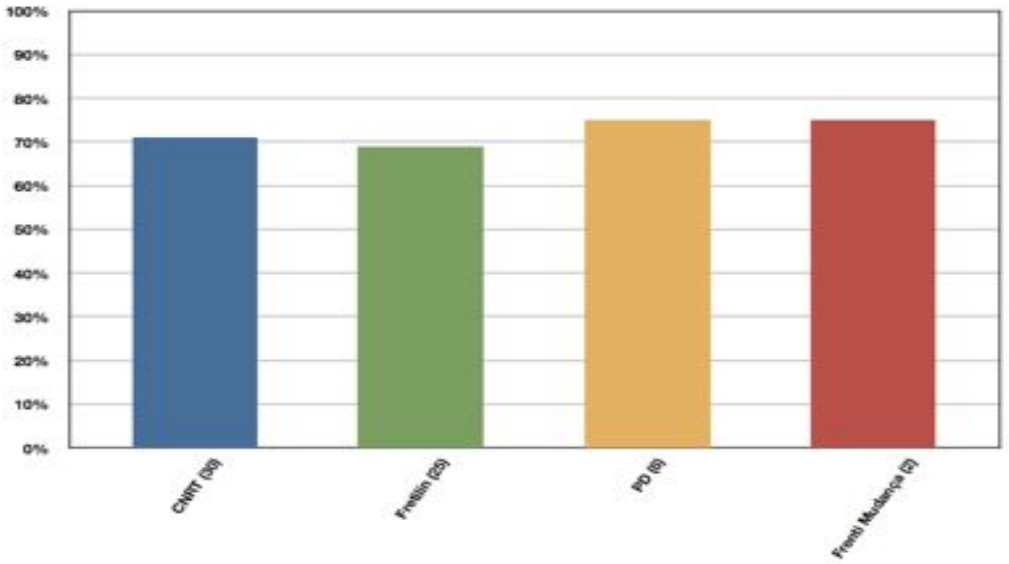

REKOMENDASi 5

Parlemen Nasional harus menerapkan sanksi berdasarkan pada Peraturan Internal Parlemen terhadap para anggota parlemen yang tidak disiplin terhadap jam kerja tanpa adanya justifikasi/pemberitahuan terlebih dahulu.

B. Proses legislatif tidak efektif

Pada tahun 2012 Parlemen Nasional hanya dapat mengesahkan 10 undang-undang. JSMP mengamati bahwa sidang pleno dan pemungutan suara seringkali tidak dapat dilakukan karena kworum tidak cukup – berarti masalah ketidakhadiran dari para anggota parlemen memberikan dampak serius bagi proses perancangan undang-undang.

JSMP juga mengamati selama tiga tahun yang terakhir bahwa terdapat anggota parlemen tertentu yang lebih memilih untuk mengabaikan undang-undang yang dianggap tidak memberikan keuntungan bagi kepentingan partai mereka. Hal ini terjadi pada saat dalam proses diskusi terhadap rancangan undang-undang Program Nasional untuk Reparasi dan Rancangan Undang-Undang Institusi Memori Publik. Anggota parlemen tertentu meninggalkan sidang pleno dan ada yang mengusulkan penundaan atas proses diskusi tersebut tanpa adanya justifikasi. JSMP mengakui bahwa para anggota parlemen memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan perspektif dari mitra (*stakeholder*) seperti kelompok pejuang/veteran. Namun anggota Parlemen berkewajiban untuk melakukan perdebatan terhadap rancangan undang-undang dan memberikan keputusan akhir melalui pemungutan suara. Publik tidak dapat menerima adanya penundaan dari Parlemen terhadap rancangan undang-undang penting tertentu.

Dalam proses perancangan undang-undang, JSMP mengamati bahwa para anggota parlemen belum secara aktif memberikan kontribusi. JSMP prihatin bahwa meskipun para anggota parlemen ingin berpartisipasi dalam debat pembuatan undang-undang, mereka tidak dapat memberikan pendapat mereka karena mereka tidak begitu memahami rancangan undang-undang tersebut. Hal ini terjadi karena biasanya anggota parlemen hanya mendapatkan versi Portugis dan rancangan undang-undang tersebut sangat kompleks. Misalnya, Undang-Undang mengenai "Aksi Mogok" sebenarnya beberapa anggota Parlemen memiliki ide untuk memberikan kontribusi dalam perdebatan secara aktif, namun karena rancangan undang-undang tersebut hanya tersedia dalam bahasa Portugis, sehingga menjadi persoalan bagi para anggota parlemen untuk mendiskusikan dan menafsirkan pasal-pasal yang tertera dalam undang-undang tersebut. Hasil terakhir memaksa para anggota parlemen dengan diam-diam mengambil surat pemungutan suara dengan mengesahkan udang-undang tersebut. Sebagaimana dicatat oleh JSMP pada tahun lalu, mayoritas anggota parlemen tidak memahami bahasa Portugis.[2] Untuk menjamin semua anggota Parlemen dapat berpartisipasi dengan baik dalam proses pembuatan undang-undang, maka semua rancangan undang-undang harus ditulis dalam Tetum dengan penjelasan yang sederhana mengenai apa yang tertera dalam undang-undang seperti halnya di negara lain.

JSMP juga berpendapat bahwa waktu dan target mengenai proses konsultasi publik tidak ditentukan dengan jelas. Banyak undang-undang yang seringkali tidak berkualitas karena tidak melalui proses analisis dan tidak mencerminkan realitas Timor-Leste. Misalnya Usulan Rancangan Undang-Undang mengenai Pertanahan pada akhirnya diveto oleh Presiden karena mendapatkan reaksi keras dari masyarakat madani bahwa tidak adanya konsultasi yang memadai terhadap undang-undang ini dan terutuma tidak mencerminkan realitas dan konteks Timor-Leste. JSMP merekomendasikan kepada parlemen untuk memperpanjang dan memperbaiki proses konsultasi publik dengan para pihak yang berkepentingan.

[2] Laporan tahunan JSMP, 'Bersama Membangun Sistem Demoktrasi yang Kuat di masa mendatang' (2011): <www.jsmp.tl>

REKOMENDASI 6

Harus menyediakan dokumen, termasuk rancangan undang-undang dalam dua versi resmi – Tetum dan Portugés agar dapat menfasilitasi pemahaman semua anggota Parlemen dan untuk diakses oleh publik.

REKOMENDASI 7

Institusi yang menyiapkan rancangan undang-undang harus menyediakan penjelasan yang sederhana mengenai setiap pasal agar dapat menfasilitasi pemahaman semua anggota Parlemen dan dapat diakses oleh publik.

C. Sumber daya parlemen tidak dikelola dengan efisien

JSMP terus melihat bahwa Parlemen Nasional masih memiliki keterbatasan penasehat dan pegawai yang dapat memberikan dukungan bagi pada anggota Parlemen. Pada tahun 2012, jumlah penasehat bertambah menjadi 11 orang. Dari beberapa penasehat tersebut, 7 orang berasal dari Parlemen sendiri dan 4 orang berasal dari UNDP. JSMP prihatin karena hanya 2 orang penasehat yang memberikan dukungan kepada semua komisi. Satu orang penasehat yang memberikan dukungan khusus untuk Presiden Parlemen Nasional dan yang lain memberikan dukungan teknis seperti hukum, sumber daya manusia dan komunikasi sosial.

Keterbatasan penasehat di Parlemen terus memberikan dampak bagi anggota Parlemen untuk benar-benar memahami dengan baik isi dari sebuah usulan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah, yang mayoritasnya hanya dirancang dalam bahasa Portugis. JSMP terus merekomendasikan kepada parlemen untuk merekrut dan mempekerjakan para penasehat internasional dan nasional yang secukupnya, terlebih untuk mendukung para komisi yang saat ini belum memiliki penasehat khusus.

Parlemen Nasional sebelumnya mendapatkan dukungan internet dari The Asia Fundation (TAF). Namun para anggota parlemen belum menggunakan fasilitas tersebut secara efisien dan efektif. Sesuai dengan rencana pada tahun 2013 UNDP akan memasang program *'software stock system logistic*' di Parlemen Nasional. JSMP berpandangan bahwa yang terpenting adalah memahami dengan baik alat komunikasi elektronik tersebut dan menggunakan dengan baik agar dapat membantu pekerjaan para anggota Parlemen.

Pada periode Legislatif Kedua Parlamen Nasional (2008–2012) menyediakan 65 laptop untuk setiap anggota parlemen. Sesuai dengan rencana, laptop tersebut diberikan kepada mantan anggota parlemen sebagai donasi. JSMP berpendapat bahwa Parlemen perlu menghindari pengeluaran semacam itu dan menghindari keperluan untuk membeli fasilitas yang sama di masa mendatang.

Pada masa Legislatif Kedua Parlemen Nasional juga membeli mobil bermerk 'Pajero' sebanyak 65 unit untuk setiap anggota parlemen. Namun 21 orang anggota Parlemen menolak untuk menerima mobil tersebut — 19 orang dari FRETILIN dan 2 orang dari PUN, dengan alasan politik karena melihat pada situasi masyarakat Timor-Leste yang belum memungkinkan bagi anggota Parlemen untuk menikmati mobil mewah atau mobil yang lebih baik.

Tabel 8: Mobil untuk anggota parlemen pada periode Legislaf Kedua (2008 – 2012)

Fraksi-Fraksi	Jumlah mobil yang diterima		Jumlah pengeluaran
CNRT	18		$612,000
PD	8		$272,000
PSD	6		$204,000
ASDT	5		$170,000
Fretilin	2		$68,000
KOTA	2		$68,000
UNDERTIM	2		$68,000
Independente	1		$34,000
Jumlah	44		US $1,49 junta

Dari 44 mobil yang dibeli oleh Negara pada tahun 2008, pemerintah telah melakukan lelang bagi mereka yang menggunakan mobil tersebut dengan harga US$9,000 untuk setiap mobil. Pada tahun 2013, pemerintah telah membeli mobil baru, mobil tersebut akan dibagikan bagi setiap anggota parlemen pada periode Legislatif Ketiga dan satu mobil untuk Komisi Khusus. Setiap mobil berharga US$63,000. Total uang yang dikeluarkan untuk membeli mobil baru adalah berjumlah 4,2 miliar dollar Amerika.

Grafik 3: Perbandingan – total keuangan untuk pembelian mobil dan total keuangan untuk SEPI dan kepada pengadilan – 2008 & 2012

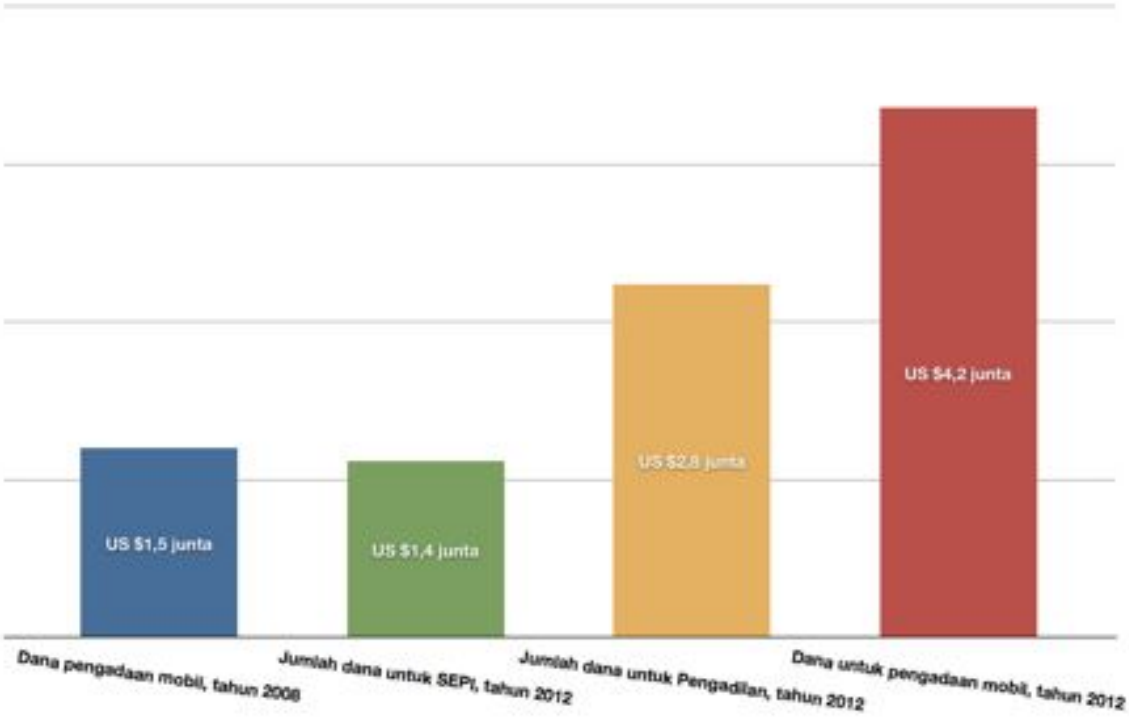

JSMP mempertanyakan mengapa parlemen tidak terus menggunakan mobil yang dibeli pada periode Legislatif Kedua. Ini menunjukan tidak adanya pemanfaatan sumber daya negara yang sangat terbatas dengan baik dan tidak seimbang dengan keuangan institusi-institusi lain seperti pengadilan.

JSMP mengakui pentingnya anggota parlemen mendapat dukungan transportasi yang memadai untuk menfasilitasi pekerjaan mereka. Namun, JSMP merekomendasikan kepada parlemen untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu pada setiap periode untuk membeli fasilitas yang sama.

REKOMENDASI 8

Parlemen Nasional perlu menjamin adanya keuangan yang memadai untuk manambah penasehat nasional dan internasional, juga termasuk staff pendukung secara teknis kepada parlemen dan staf peneliti untuk membantu tugas-tugas parlemen menjadi lebih efektif.

REKOMENDASI 9

Parlemen Nasional perlu menghindari biaya yang tidak perlu pada setiap periode untuk membeli fasilitas yang sama, misalnya pembelian mobil baru untuk para anggota parlemen.

4. KEGIATAN JSMP

A. Pelatihan kepada masyarakat

Pada tahun 2012 JSMP terus melakukan kegiatan pelatihan bagi masyarakar untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai demokrasi dan sistem parlementer. Strategi ini dimaksudkan JSMP untuk meningkatkan pemahaman publik adalah melalui pemberian pelatihan (lokakarya) di tingkat desa. Di setiap pelatihan tersebut, JSMP memanfaatkannya untuk membagi informasi mengenai kegiatan parlemen selama tahun-tahun legislatif sebelumnya.

Pada tahun 2012, JSMP mengadakan lokakarya 4 kali di Desa Bobocasse, Distrik Oe-Cusse; Desa Ililai, Distrik Lautem; Desa Betano, Distrik Manufahi; dan Desa Camnasa, Distrik Covalima. Selama diadakannya lokakarya tersebut, JSMP melakukan diskusi dan memberikan informasi kepada para peserta mengenai proses pembuatan undang-undang di Timor-Leste dan tugas-tugas parlemen.

Para peserta merekomendasikan kepada JSMP untuk terus melakukan kegiatan yang sama kepada masyarakat di desa lain. Peserta menuntut kepada Parlemen untuk membagikan informasi mengenai undang-undang yang telah disahkan dan telah diterbitkan di Lembaran Negara kepada setiap desa dan hingga ke kampung-kampung. Peserta juga mempertanyakan parlemen dan pemerintah yang tidak melakukan konsultasi publik yang memadai terhadap undang-undang, terlebih di daerah terpencil. Oleh karena itu, para peserta merekomendasikan kepada JSMP untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada parlemen dan pemerintah.

Masyarakat pun menyarankan kepada Negara untuk memasukan program pendidikan kewarganegaraan dalam agenda mereka agar dapat membagi informasi kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh JSMP.

REKOMENDASI 10

Parlemen Nasional perlu menggunakan dengan baik alat-alat komunikasi seperti radio dan televisi untuk menfasilitasi akses publik dan kampanye langsung mengenai tugas-tugas parlemen, agar dapat membagi informasi kepada publik dengan lebih baik.

B. Seminar Nasional

Pada tanggal 23 Agustus 2012, JSMP mengadakan seminar nasional dengan tema 'Peranana Parlemen Nasional dalam bidang Perundang-undangan, Pengawasan dan Pengambilan Keputusan Politik: Harapan dan Tantangan'. Tujuan dari seminar tersebut adalah untuk memeperbaiki dan meningkatkan transparasi, akuntablitas dan kualitas kerja Parlemen Nasional dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses perumusan undang-undang dan kebijakan Negara.

Wakil Presiden Parlemen Nasional, Adriano do Nascimento mewakili Meja Parlemen Nasional, Anggota Parlemen, Francisco Miranda Branco mewakili partai oposisi Fretilín dan Anggota Parlemen Natalino do Santos, mewakili Kubu Koalisi, namun tidak dapat hadir karena berhalangan. Para anggota Parlemen diundang sebagai pembicara. Para peserta berasal dari otoritas komunitas desa di lima distrik antara lain Distrik (Lautem, Ainaro,

Covalima, Manufahi, dan Dili) yang mengikuti seminar ini. Para peserta merekomendasikan kepada JSMP untuk terus mengorganisir seminar semacam ini setiap tahun dua kali atau lebih untuk menfasilitasi komunikasi antara parlemen dan warga negara, terlebih para pimpinan otoritas lokal.

C. Evaluasi

Pada tahun 2012, TAF melakukan evaluasi independen mengenai kegiatan POP selama tahun 2010-2012.[3] Evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa program ini dilakukan dengan sukses dan memiliki hubungan baik antara masyarakat madani dan publik secara umum dan dengan Parlemen Nasional. Evaluasi ini mengakui program tersebut sangat penting dalam konteks Timor-Leste dan merekomendasikan untuk memperbaiki dampak dari program ini. JSMP bertekad untuk menjalankan rekomendasi tersebut agar dapat mendukung pembangunan sistem demokrasi di Timor-Leste.

[3] Norbu Thupten, 'A Snapshot Assessment of the Parliament Watch Project, Year One and Year Two Project Implemented by Judicial System Monitoring Program' (01/08/2012).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada tahun 2012, demokrasi di Timor-Leste terus dapat diperkuat, terlebih pemilihan umum yang diselenggarakan dengan sukses dan adanya perkembangan yang signifikan di Parlemen Nasional dalam hal pengawasan. JSMP meminta kepada parlemen yang baru untuk meningkatkan upaya-upaya tersebut dalam 5 tahun mendatang untuk melanjutkan kemajuan-kemajuan positif ini.

JSMP terus prihatin dengan kehadiran yang tidak teratur dari anggota parlemen yang seringkali menunda proses perundang-undangan karena Parlemen tidak memenuhi kworum. JSMP juga prihatin bahwa anggota parlemen tidak berpartisipasi dengan baik dalam proses pembuatan undang-undang karena semua rancangan undang-undang ditulis dalam bahasa Portugis dan sangat kompleks. Para anggota parlemen tidak memenuhi kewajiban mereka jika mereka tidak memahami dengan baik apa yang dijabarkan dalam undang-undang tersebut.

JSMP juga mengakui parlemen tidak sempat melakukan perdebatan terhadap beberapa undang-undang penting seperti Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi, Rancangan Undang-Undang Reparasi dan Institusi Memori Publik. JSMP berharap bahwa parlemen dapat mengagendakan kembali beberapa undang-undang ini pada 'Program Legislatif Nasional' yang baru.

Berdasarkan analisis laporan ini, berikut beberapa rekomendasi yang ditawarkan oleh JSMP untuk dipertimbangkan pada tahun-tahun mendatang:

1. Parlemen Nasional harus membentuk sebuah 'Program Legislatif Nasional' seperti di Negara-negara lain untuk menjamin bahwa kebijakan perundang-undangan sesuai dengan prioritas nasional untuk 5 tahun mendatang.

2. Parlemen Nasional harus mempertimbangkan rancangan undang-undang penting yang telah kadaluwarsa, termasuk rancangan undang-undang Institusi Memori Publik, Undang-Undang Reparasi Nasional dan Undang-Undang Anti Korupsi.

3. Parlemen Nasional perlu melakukan proses konsultasi yang terbuka, mendalam dan substansial dengan para pihak yang relevan mengenai rancangan undang-undang dan menjamin keterlibatan publik dalam proses legislatif untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mewadahi/mewakili aspirasi masyarakat, realitas aktual dan kepentingan nasional.

4. Parlemen Nasional harus menentukan sebuah panduan mengenai tata cara/proses yang tepat untuk menetapka proses penangguhan bagi anggota pemerintah sesuai dengan pasal 113.1 Konstitusi. Panduan ini harus menjelaskan bahwa penangguhan tersebut diterapkan sejak awal proses hukum dimulai (dari adanya pengajuan dakwaan) sampai proses tersebut selesai, termasuk sampai adanya upaya hukum banding.

5. Parlemen Nasional harus menerapkan sanksi berdasarkan pada Peraturan Internal Parlemen terhadap para anggota parlemen yang tidak disiplin terhadap jam kerja tanpa adanya justifikasi/pemberitahuan terlebih dahulu.

6. Parlemen Nasional perlu menyediakan dokumen, termasuk rancangan undang-undang, dalam dua versi resmi – Tetum dan Portugis agar dapat menfasilitasi pemahaman semua anggota parlemen dan juga diakses oleh publik.

7. Institusi yang menyiapkan rancangan undang-undang juga harus menyediakan penjelasan sederhana terhadap setiap pasal, agar dapat menfasilitasi pemahaman semua anggota parlemen dan juga diakses oleh publik.

8. Parlemen Nasional perlu menjamin adanya alokasi keuangan yang memadai untuk menambah penasehat nasional dan internasional, juga termasuk staf pendukung teknis bagi parlemen dan staff peneliti agar membantu tugas-tugas parlemen untuk lebih efektif.

9. Parlemen Nasional perlu menghindari pengeluaran yang tidak perlu pada setiap periode untuk membeli fasilitas yang sama, misalnya mobil baru bagi anggota parlemen.

10. Parlemen Nasional perlu menggunakan dengan baik alat komunikasi seperti radio, televisi untuk dapat menfasilitasi publik dan melakukan kampanye secara langsung, agar dapat membagi informasi kepada publik dengan lebih baik.

Visi JSMP

Masyarakat demokratik yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia untuk semua orang.

Misi JSMP

JSMP akan bekerja dengan semangat kolaborasi guna mempromosikan dan melindungi demokrasi, hukum, keadilan dan hak asasi manusia melalui:

- Pemantauan
- Pendidikan hukum, dan
- Advokasi.

Bekerjasama untuk membangun sistem peradialan yang kuat dan adil bagi semua orang Timor

www.jsmp.tl

Nomor Kontak: 3323883